

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi Kota Kupang

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT yang terletak dibagian tenggara Provinsi. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara :

1. 10° 36' 14" – 10° 39' 58" Lintang selatan
2. 123° 32' 23" – 123° 37' 01" Bujur timur.

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota kupang adalah :

1. Timur : kecamatan Kupang Tengah dan Tabenu Kabupaten Kupang
2. Barat : Kecamatan Kupang Barat dan selat Semau
3. Utara : Teluk Kupang
4. Selatan : Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

Kota kupang memiliki luas wilayah 180,27 Km² terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan, kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 424 RW/RK dan 1.314 RT. Kota Kupang dipimpin oleh seorang WaliKota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. WaliKota dibantu oleh seorang Wakil WaliKota yang dipilih melalui suatu pemelihan umum pada setiap tahun. Kota Kupang memiliki perangkat daerah yaitu 18 dinas. 8 badan, 3 kantor dan 8 bagian. Disamping itu terdapat 3 instansi vertikal yaitu Badan Pertahanan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementrian Agama. Wilayah pemerintahan WaliKota Kupang meliputi 6 daerah kecamatan.

4.1.2 Penduduk Kota Kupang

Penduduk Kota Kupang adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Kupang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Penduduk Kota Kupang tahun 2016 adalah sebanyak 402.286 jiwa yang terdiri dari 206.129 jiwa laki-laki dan 196.157 jiwa perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Alak	31,907	30,183	62,090
2	Maulafa	38,455	37,004	75,459
3	Oebobo	50,479	41,217	97,696
4	Kota Raja	27,053	26,900	53,953
5	Kelapa Lima	40,999	37,851	78,850
6	Kota Lama	17,236	17,002	34,238
TOTAL		206,129	196,157	402,286

Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Kupang di Kecamatan Oebobo paling banyak yakni berjumlah 97,696 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 50,479 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 41,217 jiwa, diikuti dengan kecamatan Kelapa Lima dengan jumlah penduduk sebanyak 78,850 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 40,999 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 37,851 jiwa, dan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Kota Lama dengan total jumlah penduduk sebanyak

34,238 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 17,236 jiwa dan perempuan sebanyak 17,002 jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang, pada tahun 2015 angkatan kerja Kota kupang sebesar 154.876 orang atau 54,03 persen terhadap penduduk Kota kupang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46,33 persen berstatus bekerja dan 7,7 persen berstatus mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran Kota kupang Tahun 2015 tercatat 14,25 persen dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 54,03 persen

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Kupang, Tahun 2015

No	Kegiatan Utama	L	P	Jumlah
1	Angkatan Kerja	94,474	60,402	154,876
	- Bekerja	82,612	50,199	132,811
	-Pengangguran Terbuka	11,852	10,203	22,065
2	Bukan Angkatan Kerja	52,570	79,194	131,764
	- Sekolah	41,592	35,370	76,962
	- Mengurus Rumah Tangga	3,759	41,533	45,292
	- lainnya	7,219	2,291	9,510
	TOTAL	52,570	79,194	131,764
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.25	43.27	54.03
	Tingkat Pengangguran	12.56	16.89	14.25

Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja kota kupang tahun 2015 sebanyak 154,876 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 94,474 jiwa dan

perempuan 60,402 jiwa, sedangkan yang bekerja sebanyak 132,811 jiwa dan yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan sebanyak 22,065 jiwa.

Jumlah bukan angkatan kerja kota kupang tahun 2015 sebesar 131,764 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 52,570 jiwa dan perempuan sebanyak 79,194 jiwa dengan rincian yang bersekolah sebanyak 76,962 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 41,592 jiwa dan perempuan sebanyak 35,370 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebesar 45,292 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 3,579 jiwa dan perempuan sebanyak 41,533 jiwa dan lainnya sebesar 9,510 jiwa

4.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi Kota Kupang

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang, pada tahun 2016, penduduk miskin di Kota Kupang mengalami penurunan 0,24 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan garis kemiskinan sebesar 482.857/kapita/bulan. Nilai IPM Kota Kupang tahun 2016 sebesar 78,14 meningkat sebesar 0,19 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 4.3**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kupang, Tahun 2012 -2016**

No	Tahun	Garis kemiskinan	Penduduk miskin	
			Jumlah	Presentase
1	2012	367,598	35,00	9,41
2	2013	443,022	33,80	9,12
3	2014	413,905	33,30	8,70
4	2015	455,924	39,73	10,21
5	2016	482,857	39,59	9,97

Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Garis kemiskinan Kota Kupang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan presentase peningkatan sebesar 10,21%.

Tabel 4.4**Komponen Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2014-2016.**

No	Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lamanya sekolah	pengeluaran riil perkapita disesuaikan	IPM
1	2014	68,14	15,55	11,41	12,766	77,58
2	2015	68,34	15,75	11,43	12,855	77,95
3	2016	68,46	15,76	11,44	12,986	78,14

Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Angka partisipasi umur Kota Kupang pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 91,19, untuk jenjang SMP sebesar 72,86, dan untuk SMA sederajat sebesar 63,27. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk

usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Berdasarkan Susenas 2016, presentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang tidak punya ijazah sebesar 3,2 persen. Rata-rata lama sekolah di Kota Kupang sebesar 6,48 persen. Hal ini berarti pada tahun 2016 penduduk Kota Kupang rata-rata lama sekolahnya 6-7 tahun. Angka buta huruf di Kota Kupang sebesar 0,55 persen.

Tabel 4.5
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kupang, 2016

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	91,19	107,85
2	SMP/MTs	72,86	94,54
3	SMA/SMK/MA	63,27	104,85

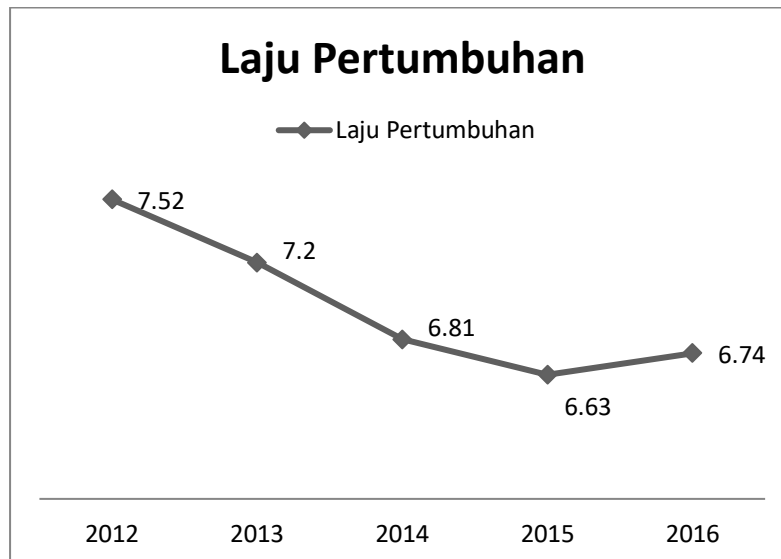
Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan dengan presentase tertinggi ialah jenjang pendidikan SD/MI, dengan 91,19% diikuti SMP/MTs 72,86% dan SMA/SMK/MA dengan presentase 63,27%.

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Gambar 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang



Sumber data : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), di bagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari suatu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.11 poin.

4.2 Profil Tempat Penelitian

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

4.2.1.1 Visi

Visi Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah “Mewujudkan Nusa Tenggara Timur Sebagai Salah Satu Destinasi Utama Pariwisata Indonesia Di Tahun 2018”.

4.1.1.2 Misi

Misi Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, menarik dan berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan promosi pariwisata yang berkualitas dengan memanfaatkan pengakuan dunia terhadap Komodo dan Kelimutu sebagai salah satu keajaiban dunia serta berbagai obyek wisata lainnya dalam rangka meningkatkan arus kunjungan dan arus investasi di Nusa Tenggara Timur.
3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya dengan memaksimalkan potensi lokal, guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK dalam rangka membuka usaha baru bagi masyarakat.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Tugas pokok dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah: membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

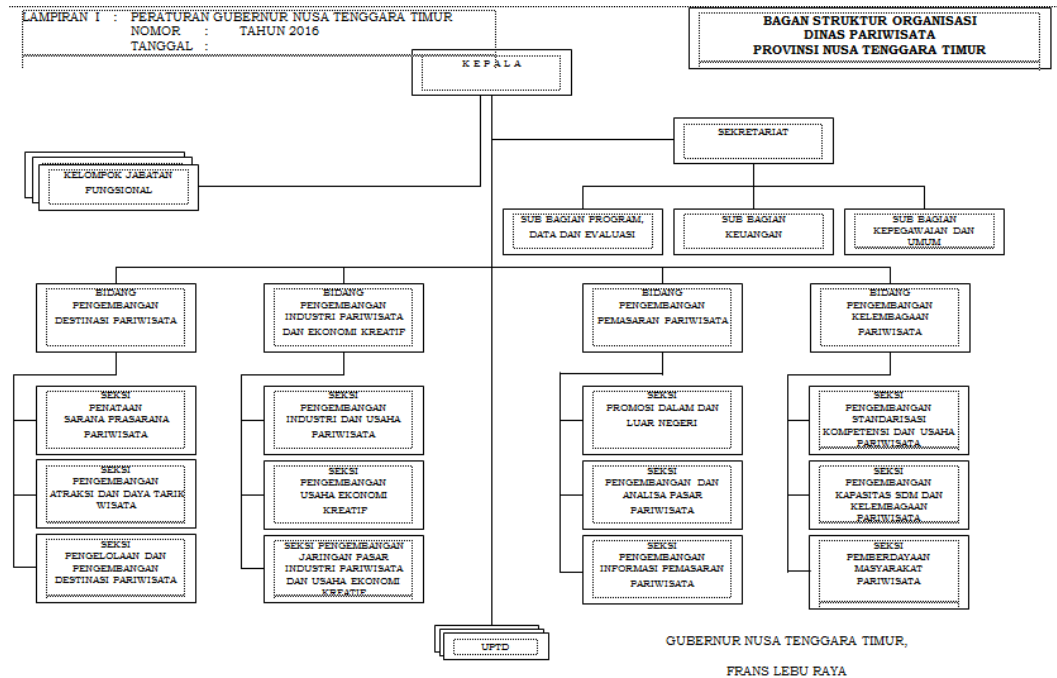
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi NTT, maka Dinas Pariwisata Provinsi NTT mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penataan Sarana Prasarana Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 - c. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar Industri Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar Pariwisata
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Usaha Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi NTT



4.2.4 Tugas Pokok Kepala Dinas dan Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing-masing dengan rumusan tugas sebagai berikut:

1. Kepala

Tugas pokok Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT adalah merumuskan program kerja di bidang pariwisata meliputi kesekretariatan, destinasi pariwisata, industri pariwisata dan usaha ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata serta unit pelaksana teknis pengelolaan pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan pariwisata

dan percepatan pertumbuhan pariwisata untuk terwujudnya *the new tourism territory*.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah merencanakan operasional bidang destinasi pariwisata yang meliputi penataan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi dan daya tarik pariwisata dan pengelolaan destinasi pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung.

4. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah merencanakan operasional bidang industri pariwisata meliputi industri dan usaha pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan industri pariwisata dan usaha ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjadikan NTT sebagai daerah destinasi wisata yang kompetitif.

5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah merencanakan operasional pemasaran pariwisata meliputi promosi dalam dan luar negeri, analisa pasar pariwisata dan informasi pemasaran pariwisata berdasarkan segmen pasar personal, kerjasama internasional dan klaster pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata.

6. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata adalah merencanakan operasional bidang kelembagaan kepariwisataan meliputi standarisasi kompetensi dan usaha pariwisata, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan mutu usaha pariwisata dan profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan.